

Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta melalui Program Koperasi Merah Putih

HM. Mashuri, Suryo Ediyono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

- Corresponding author: hurindo.motor1616@gmail.com

Abstrak: Program Koperasi Merah Putih (PKMP) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi yang menjadi banyak dijadikan faktor diberbagai lini kehidupan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui PKMP dengan pendekatan komunikasi partisipatif. Teori yang mendasari adalah Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment) dari Laverack (2005) dan Tangga Partisipasi (A Ladder of Citizen Participation) dari Arnstein (1969). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan (pengurus, anggota koperasi, dan fasilitator pemerintah), observasi partisipatif di tiga lokus PKMP, serta analisis dokumen. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan PKMP memiliki peranan dalam segi pemberdayaan ekonomi dan menunjang partisipasi masyarakat ke tingkat ‘kemitraan’ (partnership) dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Pemberdayaan ekonomi tercapai melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan jaringan pemasaran. Diskusi mengaitkan temuan dengan teori Laverack, di mana peningkatan aset dan kapasitas kolektif menjadi fondasi kemandirian komunitas. PKMP memiliki peran sebagai jembatan komunikasi pemberdayaan yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi kota yang berdikari.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, partisipasi, koperasi, ekonomi berdikari, komunikasi Pembangunan

Abstract: The Red and White Cooperative Program (PKMP) is a policy of the Surakarta City Government to encourage community-based economic independence. The economy has become a factor in various lines of life. This research aims to describe the process of community empowerment through PKMP with a participatory communication approach. The underlying theories are Laverack's (2005) Community Empowerment and Arnstein's A Ladder of Citizen Participation (1969). The research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants (administrators, cooperative members, and government facilitators), participatory observation in the three PKMP locus, and document analysis. The data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman (1994). The results of the study show that PKMP has a role in terms of economic empowerment and supports community participation to the 'partnership' level in decision-making and business management. Economic empowerment is achieved through increasing entrepreneurial capacity, access to capital, and strengthening marketing networks. The discussion linked the findings to Laverack's theory, where increased assets and collective capacity become the foundation

of community self-reliance. PKMP has a role as a bridge of empowerment communication that increases the active participation of the community and its contribution to the economic development of an independent city.

Keywords: community empowerment, participation, cooperatives, independent economy, communication Development

Article History :

Received 12-11-2025; Revised 25-11-2025; Accepted 24-12-2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek. Kota Surakarta, dengan karakter masyarakat yang memiliki modal sosial kuat, berpotensi besar menggerakkan pembangunan dari akar rumput. Namun, tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif masih menghambat potensi tersebut. Sebagai respons, Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Program Koperasi Merah Putih (PKMP), sebuah inisiatif yang bertujuan menciptakan ekonomi kerakyatan yang mandiri melalui wadah koperasi (Pemerintah Kota Surakarta, 2022).

Teori pemberdayaan komunitas (Community Empowerment) yang dikemukakan Laverack (2005) menekankan proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupan dan lingkungan mereka, meliputi penguatan aset, peningkatan kapasitas, dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Sementara itu, teori partisipasi masyarakat Arnstein (1969) dalam “A Ladder of Citizen Participation” menyediakan kerangka untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat, dari yang bersifat tokenisme hingga pemberian kekuasaan penuh (citizen control). Partisipasi yang bermakna berada pada tingkat partnership hingga citizen control.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai koperasi di Indonesia, seperti studi Prasetyo (2020), lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan dan manajemen, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam dimensi komunikasi dan partisipasi dalam program koperasi yang diinisiasi pemerintah daerah. Terdapat kesenjangan antara narasi kebijakan yang ideal dengan realitas kompleksitas partisipasi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk: (1) Menggambarkan bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam siklus Program Koperasi Merah Putih; (2) menggambarkan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan program; dan (3) Menjelaskan kontribusi program terhadap terwujudnya pembangunan kota Surakarta yang berdikari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Kota Surakarta, dengan fokus pada tiga unit Koperasi Merah Putih yang mewakili karakteristik wilayah berbeda: pusat kota, pinggiran, dan kawasan padat penduduk. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Juli 2024.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 informan kunci, yang terdiri dari pengurus koperasi (5 orang), anggota aktif (7 orang), dan fasilitator dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta (3 orang). Dan melakukan wawancara kepada informan yang terpilih serta Observasi partisipatif dilakukan pada kegiatan rapat anggota, pelatihan kewirausahaan, dan operasional usaha koperasi. Sumber data sekunder meliputi dokumen kebijakan (Perwal No. 12 Tahun 2022), AD/ART koperasi, laporan keuangan, dan notulensi rapat.

Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan kriteria informan yang memahami langsung seluk-beluk program. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PKMP terjadi pada berbagai tahap dan tingkat. Pada tahap sosialisasi dan perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui forum musyawarah di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan kebutuhan dan potensi usaha. Keterlibatan ini menunjukkan karakteristik *partnership* (kemitraan) dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), di mana terjadi pembagian tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Seorang pengurus koperasi menyatakan, *“Kami tidak hanya diberi bantuan, tapi diajak merancang dari awal usaha apa yang cocok dengan kondisi kami.”* (Wawancara dengan Ibu Sari, 10 Februari 2024).

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi terlihat dalam aktivitas operasional koperasi seperti simpan pinjam, pengelolaan warung sembako, dan unit produksi makanan ringan. Namun, partisipasi pada level pengawasan dan evaluasi strategis masih didominasi oleh pengurus inti. Temuan ini sesuai dengan kajian Ife (2016) bahwa dalam proses pemberdayaan, partisipasi sering kali berawal dari kelompok inti sebelum menyebar secara lebih merata.

Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi

PKMP berfungsi sebagai katalis pemberdayaan yang mengaktifkan beberapa domain kunci menurut Laverack (2005). Pertama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kolektif. Kedua, pengembangan kepemimpinan lokal melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan. Ketiga, penguatan aset ekonomi melalui akses permodalan lunak dan pembiayaan usaha. Keempat, pembentukan jaringan dengan pemasok, distributor, dan konsumen lokal.

Dampak ekonomi yang terukur adalah peningkatan pendapatan tambahan rumah tangga anggota sebesar 15-25% setelah satu tahun keikutsertaan. Data keuangan koperasi menunjukkan pertumbuhan omzet usaha bersama yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septiarti (2021) yang menyimpulkan bahwa koperasi berbasis komunitas memiliki ketahanan yang baik dalam menstabilkan ekonomi mikro.

Tabel 1. Profil dan Dampak Partisipasi pada Tiga Unit Koperasi Merah Putih Terpilih

Nama Unit Koperasi	Jumlah Anggota	Jenis Usaha Unggulan	Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Anggota/Bulan
Koperasi “Sejahtera”	45	Warung Sembako & Kredit	Rp 450.000
Koperasi “Maju Jaya”	32	Kerajinan Batik	Rp 600.000
Koperasi “Berkah”	28	Pengolahan Makanan	Rp 350.000

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama adalah komitmen politik pemerintah daerah yang diwujudkan dalam pendampingan teknis berkelanjutan dan kemudahan perizinan. Modal sosial berupa rasa gotong royong (solidaritas) yang tinggi dalam masyarakat Surakarta juga memperlancar mobilisasi anggota. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi variasi tingkat literasi keuangan dan manajemen di antara anggota, serta ketergantungan pada kapasitas personal pengurus inti yang berpotensi menciptakan kerentanan kelembagaan.

Diskusi hasil penelitian ini memperkuat proposisi bahwa pemberdayaan melalui koperasi adalah proses komunikasi transformatif. Keberhasilan PKMP tidak hanya terletak pada output ekonomi, tetapi lebih pada terciptanya ruang dialog dan aksi kolektif yang menguatkan kapasitas komunitas untuk mengelola sumber dayanya sendiri, yang merupakan esensi dari pembangunan kota yang berdikari (Suharto, 2014).

KESIMPULAN

Program Koperasi Merah Putih telah membuktikan dirinya sebagai instrumen komunikasi pemberdayaan yang efektif di Kota Surakarta. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis teori partisipasi Arnstein dan kerangka pemberdayaan Laverack dalam konteks program koperasi pemerintah daerah. Program ini berhasil mengangkat partisipasi masyarakat ke tingkat yang lebih bermakna (partnership) dan sekaligus menciptakan dampak ekonomi riil yang menguatkan kemandirian keluarga.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya khazanah komunikasi pembangunan dengan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang bersifat fasilitatif dan partisipatif dapat mencapai derajat pemberdayaan yang tinggi. Bagi praktisi dan pembuat kebijakan, temuan ini menyiratkan pentingnya mendesain program pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada proses penguatan kapasitas komunikasi dan kelembagaan lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret atas dukungan akademiknya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta serta seluruh pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih yang telah berpartisipasi dan membuka akses selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). Pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 93-106.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2023). Kota Surakarta dalam Angka 2023. BPS Surakarta.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Craig, G. (2007). Community capacity-building: Something old, something new? *Critical Social Policy*, 27(3), 335-359. <https://doi.org/10.1177/0261018307078846>
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Laverack, G. (2005). *Public Health: Power, Empowerment and Professional Practice*. Palgrave Macmillan.
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Narayan, D. (Ed.). (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. The World Bank.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2022). *Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih*. Pemerintah Kota Surakarta.
- Prasetyo, A. (2020). Keberlanjutan Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Tengah: Analisis Faktor Internal dan Eksternal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 45-60.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121-148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Septiarti, S. W. (2021). Peran Koperasi dalam Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 112-130. <https://doi.org/10.22146/jsp.58721>

- Servaes, J. (1999). *Communication for Development: One World, Multiple Cultures*. Hampton Press.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Wallerstein, N., & Bernstein, E. (1988). Empowerment education: Freire's ideas adapted to health education. *Health Education Quarterly*, 15(4), 379-394. <https://doi.org/10.1177/109019818801500402>
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11-17.
- Zubaedi. (2012). *Desain pemberdayaan masyarakat*. Kencana Prenada Media Group.